IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN SANITASI AMAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

(Skripsi)

Oleh:
Oksavia Nandini
NPM 2016041034

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN SANITASI AMAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

OKSAVIA NANDINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN SANITASI AMAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

OKSAVIA NANDINI

Pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk usaha melindungi air tanah dari limbah sehingga terwujudnya sanitasi aman. Pada tahun 2020, sanitasi aman di Provinsi Lampung menempati angka sebesar 2% dan membutuhkan upaya peningkatan yang optimal. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Lampung yang lolos sanitasi dasar dan diharapkan mampu memenuhi sanitasi aman sehingga mendukung peningkatan sanitasi aman di Provinsi Lampung. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh setiap daerah, Kabupaten Pringsewu melaksanakan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan dengan berbasiskan kepada masyarakat dengan tujuan menjaga air lingkungan agar sesuai baku mutu air. Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi dan mendefinisikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu sebagai upaya menjaga kualitas air lingkungan sehingga terwujudnya sanitasi aman melalui teori Jones (1996) yang terdiri dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu belum terlaksana dengan optimal dimana capaian sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu sebesar 4,8% dari target 10%. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikator yang tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sanitasi Aman*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT POLICY IN IMPROVING SAFE SANITATION COVERAGE IN PRINGSEWU DISTRICT

By

OKSAVIA NANDINI

Domestic wastewater management is a form of an effort to protect groundwater from waste so that safe sanitation can be achieved. In 2020, safe sanitation in Lampung Province reached 2% and requires optimal improvement efforts. Pringsewu Regency is one of three districts in Lampung Province that passed basic sanitation and is expected to be able to fulfill safe sanitation so as to support increasing safe sanitation in Lampung Province. The domestic wastewater management policy is a policy of the Ministry of Public Works and Public Housing which is implemented by each region. Pringsewu Regency implements this policy through Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning domestic wastewater management which is carried out on a community basis with the aim of maintaining environmental water so that it meets standards water quality. This research aims to identify and define the implementation of domestic wastewater management policies in Pringsewu Regency as an effort to maintain environmental water quality so that safe sanitation can be achieved through Jones' (1996) theory which consists of organization, interpretation and application. The results of the research show that the domestic wastewater management policy in Pringsewu Regency has not been implemented optimally, with safe sanitation achieved in Pringsewu Regency.thousands amounting to 4.8% of the target of 10%. This is because there are indicators that are not implemented well.

Keywords: Policy Implementation, Management of Domestic Wastewater, Safe Sanitation

Judul Skripsi	:	**IMPLEMETASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIBAH DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN SANITASI AMAN DI KABUPATEN PRINGSEWU**
Nama Mahasiswa	:	Oksavia Nandini
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2016041034**
Program Studi	:	**Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Meiliyana, S.IP., M.A.	**Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**
NIP. 197405202001122002	NIP. 199109242019032019

2. Ketua Jurusan Ilmu Admiistrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**

Sekertaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Mei 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.

2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,

Oksavia Nandini
NPM 2016041034

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Oksavia Nandini, lahir di Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada 12 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yuniarto dan Ibu Dewi Lindawati dan memiliki seorang adik bernama Kayla Huwaida. Penulis bertempat tinggal di Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Aisiyah Bustanul Athfal Tambahsari pada tahun 2008 yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tambahrejo yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi (HIMAGARA). Pada Januari-Februari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tigajaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, kemudian dilanjutkan melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada bulan Februari-Agustus 2023.

MOTTO

"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah."

(QS. Ghafir: 44)

"When the sun seems to a little slower and your days are filled with dark hope, reach into the core of you and remember the warmth."

(Bianca Sparacino)

"The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually become that thing. Being in the process itself is a prize."

(Mark Lee)

"Ketika kita memiliki rasa syukur yang besar, maka perasaan sedih hanya akan bertahan sebentar."

(Unknown)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin
Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah
Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar,
Aku persembahkan karyaku ini sebagai bentuk cinta dan terimakasihku
kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari rindho dan doa yang telah bapak dan ibu panjatkan kepada Allah SWT. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak terhitung. Semoga pencapaianku ini menjadi awal untuk membuat kalian bangga dan bahagia.

Keluarga Besar dan Sahabat,

Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik dan kebaikan berbalik kepada kalian.

Almamater Tercinta,
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Set. yang telah mecurhakan segala berkah, ridho, dan hidayah-Nya sehingga telah diselesaikannya skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman Di Kabupaten Pringsewu"** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Administasi Negara. Penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini yang akhirnya dapat diatasi berkat batuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Yuniarto dan Ibu Dewi Lindawati, terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Terima kasih sudah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, kebahagiaan, lindungan dari Allah SWT dimanapun berada, serta keberkahan dunia akhirat. Terima kasih juga kepada adikku tersayang, Kayla Huwaida atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang tiada habisnya. Semoga kelak dipermudah dalam segala urusan dan meraih cita-cita.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian,

motivasi, saran, dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi wawasan dan pelajaran untuk saya.

4. Ibu Ita Prihantika, So.Sos., M.A., selaku dosen sekaligus Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Lampung. Terimakasih atas motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan segala arahan, tenaga, bimbingan, dan bekal pengetahuan kepada saya dalam menjalani perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Dosen Penguji, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya.
8. Seluruh staf Jurunsan Ilmu Administrasi Negara atas segala bantuannya dalam berbagai administrasi dalam kegiatan perkuliahan dan dalam proses skripsi.
9. Seluruh informan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, dan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang belum bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

11. Kepada Tiara Puspa Prameswari, yang aku kenal di tempat latihan olim kelas 6 SD dan saat ini menjadi sahabatku, yang sudah menemani di setiap masaku dan siap sedia telinga dan tenaganya untuk membantuku. Terima kasih sudah menjadi tangan yang halus saat membantu dan telinga yang lapang untuk mendengar, terima kasih sudah memberikan pengertian yang sangat baik dan selalu mendukung keputusanku. Semoga kamu selalu ada di dalam prosesku kedepannya dan selalu menjadi teman yang baik, begitu juga aku untukmu.
12. Kepada sahabatku, Nafasha Sabina Azahra, Mayra Adzkia, dan Rindu Syabilla Aldisa yang selalu menjadi tempat nyaman dan memberikan kekuatan dalam setiap keadaan, selalu ada dalam setiap prosesku dari masa SMA hingga saat ini. Terima kasih atas obrolan-obrolan yang bermakna tentang kehidupan dan cita-cita. *You all growing me up*, semoga kita selalu bisa mendukung satu sama lain dan memberikan banyak kasih sayang kedepannya.
13. Kepada sahabat-sahabat SMA-ku atas pertemanan yang luar biasa menyenangkan dan segala dukungannya, semoga pertemanan ini akan terus terjalin dengan baik dan saling mendukung dalam mencapai cita-cita yang diimpikan.
14. Kepada sahabatku, Kharisma Widianingrum. Terima kasih sudah menjadi tempat yang nyaman, menjadi teman berjuang yang sangat baik, berbagi tawa, tangis, cerita, dan terima kasih sudah memberikan banyak dukungan, validasi, serta energi baik kepada penulis. Terima kasih untuk selalu berbuat baik dan berusaha terus menjadi baik.
15. Kepada sahabatku, Elisabet Lili Suasha, Dhea Amelia Ayus, Riska Amanda, Wikke Widya Ariyani, dan Ranie Adelia Islamia Kaloko yang telah saling menjaga, berbagai keluh kesah, dan menjadi tempat nyaman selama menjalani perkuliahan. Semoga kita terus berteman dan selamat berproses dijalan masing-masing.
16. Teman seperjuanganku Halwa Anjumi Tanawar dan Hendra Setiawan yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga proses

penyelesaian skripsi ini, semoga seluruh bantuan, tenaga, dukungan dan ilmu yang diberikan menjadi bekal baik untuk kalian.

17. Teman-teman KKN Desa Tiga Jaya, Mesia Rohbani, Shakila Amanda Putri, Yeri Agil Safitri, M. Firki Aqila Nazlia Putra, Gilang Adi Cahya, dan Alief Gusnirwan Sulaiman yang telah memberikan banyak pelajaran baik, memberikan energi positif, dan memberikan affirmasi yang baik. Terima kasih sudah bersama-sama untuk saling mengerti dan mendukung, semoga kita dapat terus mendukung satu sama lain dan selamat berproses dijalan masing-masing.
18. Teman-Teman kelas Reguler B, terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang baik dari awal perkualiahan hingga pada tahap ini.
19. Kepada seluruh temann-teman Adamantia, terimakasih untuk setiap kebersaman baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
20. Kepada mba abang HIMAGARA, terkhusus Mba Caca, Mba Aya, Mba Putri, dan lainnya yang tidak dapat disebukan satu-persatu. Terimakasih atas segala saran dan bantuannya selama masa perkuliahan.
21. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
22. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mampu dan mau untuk selalu berusaha lebih keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan baik dan menjadi berani, kedepannya semoga keberanian ini akan terus ada.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Kebijakan Publik 9
2.2.2 Jenis Kebijakan Publik 11
2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 12
2.3 Implementasi Kebijakan 14
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan 14
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan 16
2.4 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik 24
2.4.1 Definisi Pengelolaan Air Limbah Domestik 24
2.4.2 Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik 27
2.5 Kerangka Pikir 27

III. METODE PENELITIAN **30**
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian 30
3.2 Fokus Penelitian 30
3.3 Lokasi Penelitian 33
3.4 Jenis dan Sumber Data 33
3.4.1 Data primer 33
3.4.2 Data Sekunder 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.5.1 Observasi 34
3.5.2 Wawancara 35
3.5.3 Dokumentasi 37

3.6 Teknik Analisis Data 38
3.6.1 Reduksi data 38
3.6.2 Penyajian Data 38
3.6.3 Penarikan Kesimpulan 38
3.7 Teknik Keabsahan Data 39
3.7.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*) 39
3.7.2 Uji Keteralihan (*Transferability*) 40
3.7.3 Uji Ketergantungan (*Dependability*) 40
3.7.4 Uji Kepastian (*Confirmability*) 40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 41
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu 41
4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 42
4.1.3 Keadaan Penduduk Kabupaten Pringsewu 44
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu 46
4.1.5 Gambaran Umum Pekon 48
4.1.6 Kondisi Sanitasi Aman Kabupaten Pringsewu 50
4.2 Hasil Penelitian 52
4.2.1 Pilar Organisasi 54
4.2.2 Pilar Interpretasi 70
4.2.3 Pilar Aplikasi 74
4.3 Pembahasan Penelitian 81
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik 82
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat 105

V. PENUTUP 112
5.1 Kesimpulan 112
5.2 Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 1

LAMPIRAN 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Skema Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui SPALD 25
2. Sub Sisten Pelayanan SPALD..... 25
3. Sub Sistem Pengumpulan SPALD..... 26
4. Sub Sistem Pengolahan SPALD 26
5. Kerangka Pikir 29
6. Teknik Analisis Data..... 39
7. Peta Kabupaten Pringsewu..... 42
8. Struktur Anggota KPP Pekon Rejosari 57
9. Sarana IPLT di Kabupaten Pringsewu 60
10. Pembangunan SPALD oleh KSM dan TFL 62
11. Implementor Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik..... 64
12. Lahan SPALD dari Hibah Warga 68
13. Hubungan Pekon, KSM, dan KPP 69
14. Kegiatan Sosialisasi, Rembuk Desa, dan Edukasi terkait SPALD 71
15. Undangan Sosialisasi SPALD..... 73
16. Kondisi SPALD Pekon Sidoharjo..... 76

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
IKA	: Indeks Kualitas Air
ILBK	: Infrastuktur Livelihood Berbasis Kawasan
IPAL	: Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPLT	: Intalasi Pengalolaan Limbah Terpadu
KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
KPP	: Kelompok Pengelola dan Pemanfaat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
ODF	: Open Defection Free
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RKM	: Rencana Kerja Masyarakat
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jarak Menengah Negara
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Llimbah Domestik
SPALD-T	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat
SPALD-S	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SOP	: Standar Operational Procedure
SR	: Sambungan Rumah
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
TPS3R	: Tempat Pembuangan Sampah Reduce-Reuse-Recycle
UPT PAL	: Unit Pelayanan Terpadu Pengelolaan Air Limbah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanitasi merupakan sektor infrastruktur yang memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan. Sanitasi merupakan komponen dasar terwujudnya kualitas hidup manusia yang mengupayakan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 9 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa (1) setiap orang berkewajiban mewujudkan, mempertahankan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, (2) dimana pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Berdasarkan teori HL Blum, derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika, faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah faktor lingkungan yang terdiri dari kebersihan lingkungan, dan sanitasi yang di dalamnya termasuk sanitasi layak dan sanitasi aman (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Pemenuhan sanitasi dalam RPJMN ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 90% sanitasi layak dan 15% sanitasi aman serta dalam SDGs berakhir pada tahun 2030 dengan menekankan kepada pencapaian target aman (*Green Network*, 2023). Menurut data Badan Pusat Stataistik Indonesia tahun 2022, sanitasi Indonesia mencapai 80% untuk sanitasi layak dan sanitasi aman pada angka 7%. Berdasarkan laporan *Environmental Performance Index (EPI)* 2022, Indonesia menempati urutan ke-125 dari 180 negara di dunia dalam

akses sanitasi aman terbaik. Selain itu, Bank Dunia tahun 2020 mengungkapkan bahwa sekitar 95% limbah toilet di Indonesia dibuang tanpa diolah terlebih dahulu di instalasi pengelolaan limbah yang berpotensi mencemari air tanah. Air limbah yang tidak diolah berpotensi merusak lingkungan dan mencemari air lingkungan sehingga dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti penyakit berbasis lingkungan, stunting, dan rendahnya ketersediaan air minum bersih.

Pemenuhan akses sanitasi aman merupakan salah satu bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Permen No 04/PRT/M/2017 menyelenggarakan kebijakan Pengolahan Limbah Domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016. SPALD merupakan perkembangan dari IPAL Komunal dengan menggabungkan IPAL Komunal MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dengan sistem perpipaan untuk penyelenggaraan sanitasi yang lebih inklusif mencakup masyarakat yang tidak memiliki dan yang memiliki jamban sehingga mampu meningkatkan akses sanitasi aman. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik berangkat dari permasalahan di tengah masyarakat. SPALD menjadi solusi bagi masyarakat dengan permukiman padat perkotaan yang tidak memiliki lahan untuk membuat sarana sanitasi aman sesuai dengan standar kesehatan serta menjadi bantuan bagi masyarakat pedesaan yang tidak memiliki pembuangan limbah air sehingga mereka membuang limbah di sungai yang berpotensi mencemari lingkungan.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang telah berstatus ODF *(Open Defecation Free)* di Pulau Sumatera yaitu kabupaten yang telah melakukan *stop* Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sehingga pengelolaan air limbah menjadi sektor prioritas karena berdampak signifikan terhadap kualitas air lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menciptakan tekanan pada air limbah, sehingga air limbah menjadi isu

kontemporer yang serius. Kabupaten Pringsewu memiliki timbulan lumpur tinja 200,51 m^2/hari dan jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk (Rustiani dkk, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2020	403.115
2.	2021	406.509
3.	2022	409.313
4.	2023	412.015

Sumber: Badan Pusat Statistik Pringsewu, 2023

Berdasarkan Tabel 1 kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan yang signifikan, kepadatan tersebut akan terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai kurang lebih 418.000 jiwa pada tahun 2025 (BPS Kabupaten Pringsewu, 2020).

Kabupaten Pringsewu telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah domestik sejak tahun 2016 yang dilakukan dengan berbasiskan kepada masyarakat. Sesuai dengan Perda Kabupaten Pringsewu No 2 tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik, SPALD bertujuan meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. SPALD terdiri dari SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat) untuk kepadatan penduduk maksimal 150 jiwa/ha dan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) untuk kepadatan penduduk minimal 150 jiwa/ha. SPALD memiliki kontribusi sebesar 2,6% terhadap sanitasi aman dan 0,36% terhadap sanitasi layak (Muammar, 2022).

Kabupaten Pringsewu telah memperoleh beberapa penghargaan yang mengakui upayanya dalam pemenuhan akses sanitasi. Salah satunya penghargaan Peningkatan Kebutuhan Sanitasi *(demand creation)* dalam STBM *Awards* pada tahun 2020 yang mengapresiasi percepatan sanitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabupaten Pringsewu juga meraih penghargaan Kategori ILBK (Infrastruktur *Livelihood* Berbasis Kawasan) Terbaik dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) *Awards* pada tahun 2023 yang di dalamnya termasuk pengelolaan air limbah.

Meskipun telah mendapat pengakuan melalui penghargaan tersebut, capaian sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu belum mencapai target dengan hanya mencapai 4,8% dari target 10% yang ditargetkan pada tahun 2024 dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Tabel 2. Indeks Kualitas Air Kabupaten Pringsewu

Indeks Kualitas Air (IKA) (%)	
2021	**2022**
63,33	50,65

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut menunjukan bahwa adanya penurunan cakupan air tanah yang bersih. Penurunan tersebut menunjukan bahwa adanya kejadian tercemarnya air tanah akibat dari limbah yang langsung bersentuhan dengan lingkungan. Dalam hal ini, sanitasi aman menjadi hal yang penting karena dapat melindungi air tanah dari pencemaran limbah. Pemenuhan sanitasi aman yang dilakukan melalui pengelolaan air limbah domestik agar sesuai dengan baku mutu air masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan dengan Kasi Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik terdiri dari beberapa hal, seperti Sambungan Rumah (SR) yang masih belum memenuhi target pembangunan SR per tahun di Kabupaten Pringsewu serta perawatan yang kurang baik. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan oleh beberapa warga di Kabupaten Pringsewu terdapat masyarakat yang menolak dan enggan untuk dibangun SR pada SPALD.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu masih belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani (2021) menyatakan kurang jelasnya tujuan kebijakan pembangunan SPALD-T menyebabkan implementor kurang memahami tujuan kebijakan sehingga kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan pelaksanaan pengelolaan air limbah di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik.

Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aviandani, dkk. (2022) dimana program yang dilaksanakan sudah jelas dan terdapat konsistensi dari pelaksana, namun minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan air limbah menimbulkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan pengelolaan air limbah domestik di Kota Malang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di berbagai daerah memiliki permasalahannya tersendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan masing-masing daerah. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik bersifat swakelola masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam seluruh aspek pelaksanaannya dengan tujuan meningkatkan daya hidup sehat bagi masyarakat. Melihat pentingnya pengelolaan air limbah domestik serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya menunjukan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu untuk diidentifikasi. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik berjalan dalam lingkungan masyarakat yang sedang berkembang seperti Kabupaten Pringsewu dengan pengetahuan terkait sanitasi dan penghasilan masyarakat yang cenderung rendah, sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan SPALD secara efektif, efisien, dan tepat dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman serta mengetahui hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk membahas lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. Memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu.
2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, terdapat dua tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi terkait implementasi kebijakan serta dapat dijadikan referensi baik dasar maupun menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan rekomendasi kepada masyarakat serta semua pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengelolaan air limbah domestik terpusat untuk meningkatkan cakupan sanitasi yang aman di Kabupaten Pringsewu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terkait "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu" perlu dilakukan peninjauan terkait dengan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk memperkaya materi kajian penelitian. Dalam hal ini digunakan empat penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam penelitian. Berikut tabel hasil penelitian terdahulu yang digunakan.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mulyani, R. (2021)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020	Menganalisis pelaksanaan kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 dan faktor yang mempengaruhinya menurut Signe.	Pelaksanaan kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 belum berhasil karena adanya kurang jelasnya tujuan kebijakan SPALD-T sehingga pelaksana kebijakan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan serta adanya pendanaan dan sumber daya yang kurang maksimal.

2.	Aviandani, K. dkk., (2022)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Menganalisis pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki unsur kebijakan yang baik serta tujuan yang jelas namun adanya kendala dalam dukungan masyarakat akibat dari rendahnya pengetahuan masyarakat.
3.	Abdillah, M., 2021	Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) IPAL Komunal di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Mengevaluasi program SANIMAS Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Meranti Pandak dengan menggunakan Analisis Komparasi.	Pelaksanaan kebijakan Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Meranti telah sesuai namun penyediaan sarana dan prasarana air limbah masih belum sesuai.
4.	Sindriani Dakhi, 2023	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Tualang (Studi Kasus Perda Kab.Siak No.1 Tahun 2017)	Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Tualang (Studi Kasus Perda Kab.Siak No.1 Tahun 2017) dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di kecamatan tualang belum terimplementasi dengan optimal karena belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dimana hanya terdapat satu truk dalam satu kabupaten serta rendah-nya partisipasi dari masyarakat.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Berkaitan dengans konteks relevansi masalah penelitian, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan memiliki persamaan tema

penelitian yaitu pengelolaan air limbah domestik dengan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian berada pada lokus penelitian yang memiliki kondisi dan metode yang mempengaruhi hasil penelitian karena kondisi geografis dan budaya masyarakat yang berbeda dapat berdampak signifikan pada proses implementasi kebijakan. Selain itu, adanya penggunaan teori implementasi kebijakan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kehidupan bersama dalam suatu negara hendaknya harus diatur agar terwujudnya kehidupan yang harmonis dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui suatu aturan yang dipahami sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan dalam bentuk peraturan maupun keputusan dalam menanggapi suatu permasalahan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang mencakup langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Fokus dari kebijakan publik adalah pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang banyak.

Anderson (dalam Ravyansah dkk, 2022) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan seorang aktor dalam kegiatan tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada. Menurut Charles O. Jones (1984), istilah kebijakan sering digambarkan dengan tujuan *(goals)*, keputusan *(decisions)*, standard, program, proposal dan grand design. Sedangkan publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengikat bagi banyak individu dalam konteks strategis atau secara umum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam ranah publik.

Pelayanan masyarakat menjadi point sentral dalam kebijakan publik di negara modern. Pelayanan publik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan publik menurut Dye (1975) merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun (Prabawati dkk, 2015). Segala sesuatu tersebut berupa segala aturan dalam kehidupan bersama antar hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya atau masyarakat dengan pemerintah dalam arti mencapai tujuan masyarakat luas. Selain itu Dye juga mengungkapkan bahwa suatu kebijakan publik harus didesain dengan tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan atau permasalahan masyarakat baik individu ataupun kelompok.

Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik merupakan suatu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan atau terus-menerus untuk kepentingan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (Meutia, 2017). Berdasarkan hal tersebut, diartikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberdayakan berbagai sumber daya atau instrumen yang ada untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut David Easton (1969), kebijakan publik merujuk pada distribusi nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat, di mana hanya pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat. (Meutia, 2017). Definisi tersebut dapat diartikan sebagai proses manajemen yang merupakan serangkaian kerja pejabat publik. Menurut definisi yang dikemukakan oleh para ahli, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai tindakan pemerintah dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang memengaruhi kepentingan masyarakat secara luas.

2.2.2 Jenis Kebijakan Publik

Para pakar kebijakan menjelaskan jenis kebijakan publik dalam berbagai sudut pandang. Anderson (dalam (Meutia, 2017) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

   Kebijakan substantif adalah kebijakan yang dilihat dari substansi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, mencakup berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik. Sedangkan, kebijakan prosedural berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan substantif. Dengan demikian, kebijakan prosedural dapat dianggap sebagai kelanjutan atau pelaksanaan dari kebijakan substantif, yang berisi ketentuan-ketentuan untuk menjalankan kebijakan substantif tersebut.

b. Kebijakan distributif, kebijakan redistributif, dan kebijakan regulatori

   Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang mengatur terkait pelayanan dan timbal balik kepada kelompok sasaran atau masyarakat. Kebijakan tersebut mengalokasikan sumber daya, manfaat, serta hak kepada suatu kelompok atau individu. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur terkait dengan alokasi atau pemindahan kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelompok atau individu dengan cara mengambil dari suatu kelompok individu dan memberikannya kepada kelompok atau individu lain. Sementara itu, kebijakan regulatif adalah kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku atau aktivitas masyarakat dengan memberikan aturan, standar atau sanksi. Kebijakan tersebut berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat.

c. Kebijakan Material dan kebijakan simbolik

   Kebijakan materal merupakan kebijakan yang mengatur terkait penglokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata

bagi penerimanya dan memberikan keuntungan kepada kelompok sasaran. Sementara kebijakan simbolik adalah kebijakan yang menawarkan manfaat simbolis kepada kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut..

d. Kebijakan Barang Publik dan Barang Privat

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan atau pemberian barang atau layanan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Di sisi lain, kebijakan kebutuhan privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa oleh pihak swasta untuk kepentingan khusus atau pasar bebas.

Pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif atau distributif, tergantung pada konteks dan tujuannya. Pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif karena fokus utamanya adalah pada penetapan standar atau aturan terkait kualitas air dan cara pengelolaan limbah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan substansif dalam hal ini mencakup penetapan regulasi lingkungan, standar kualitas air, teknologi pengolahan limbah yang efektif, dan upaya untuk memastikan bahwa air limbah diolah secara memadai sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan distributif karena berusaha untuk mendistribusikan manfaat atau beban pengelolaan air limbah secara adil di antara anggota masyarakat seperti menyediakan infratsruktur bagi masyarakat untuk mengakses layanan pengelolaan air limbah. Dengan demikian, pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif dan distributif. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek teknis (substansif) dan sosial-ekonomi (distributif) dari pengelolaan sumber daya air limbah.

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik melibatkan berbagai proses dengan variabel yang harus dikaji. Suatu kebijakan publik diterapkan melalui

proses yang cukup panjang dan proses tersebut melalui beberapa tahapan yang sangat penting. Adapun tahapan-tahapan dalam kebijakan publik dalam Winarno (2012) adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan

   Identifikasi masalah merupakan kegiatan mengidentifikasi apa yang menjadi urgensi publik dan menjadi tuntutan pemerintah untuk menentukan tindakannya.

b. Penyusunan agenda

   Penyusunan agenda merupakan penentuan masalah publik yang memerlukan respon dan pertimbangan dari stakeholders untuk kemudian diteruskan ke tahap sebelumnya.

c. Perumusan kebijakan

   Masalah publik yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan akan dijelaskan secara lebih rinci untuk mencari alternatif solusi oleh para pembuat kebijakan.

d. Pengesahan kebijakan

   Proses pengesahan kebijakan merupakan pemilihan alternatif kebijakan yang menjadi kebijakan untuk diimplementasikan. Dalam proses tersebut terdapat pemberian otorisasi kepada proses dasar pemerintah.

e. Implementasi kebijakan

   Implementasi kebijakan adalah proses penerapan solusi alternatif untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh lembaga administrasi dan agen pemerintah, dengan menggerakkan sumber daya yang tersedia.

f. Evaluasi kebijakan

   Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk masyarakat umum, adalah mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil memecahkan masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada tahap implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam

tentang bagaimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu dijalankan. Ini mencakup mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi, serta penelusuran faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi menjadi tahap yang sangat penting dalam seluruh tahapan implementasi. Tahap ini menjadi tahap yang sangat penting karena pada tahap tersebut kebijakan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III (19080) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena suatu kebijakan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan cara-cara demokratis belum tentu berhasil apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan benar.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018), implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (pejabat) atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kebutuhan kebijakan. Tindakan tersebut melibatkan upaya-upaya keputusan yang diambil dari proses perumusan kegiatan menjadi operasional dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tersebut juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut badan administrasi saja melainkan berbagai aktor masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Oleh karena itu, proses pelaksanaan kebijakan menjadi elemen penting dalam ranah kebijakan publik.

Implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dunn menyatakan bahwa

implementasi kebijakan publik merupakan proses yang direncanakan seiring dengan pembuatan kebijakan tersebut. Implementasi yang efektif diharapkan dapat menghasilkan dampak atau manfaat bagi targetnya. Namun, tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan dengan baik karena seringkali implementasi lebih rumit daripada perumusannya. Selain itu, dalam proses perumusan kebijakan terkadang terdapat asumsi-asumsi yang sulit dilaksanakan dalam implementasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara apa yang direncanakan dalam perumusan kebijakan dengan kenyataan implementasinya, yang disebut sebagai "implementing gap". Implementing gap ini membuat sulitnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn, terdapat beberapa alasan suatu kebijakan dikatakan gagal, yaitu:

1. Tidak dilaksanakannya kebijakan sebagaimana yang direncanakan (non-implementation) dapat terjadi ketika suatu kebijakan tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan karena berbagai alasan, seperti kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat sehingga tidak efektif.
2. Tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses kebijakan *(unseccessful implementation)*, terjadi ketika suatu kebijakan telah dijalankan sesuai dengan perencanaan, namun mengalami kegagalan karena adanya kondisi eksternal yang tidak mendukung.

Resiko kegagalan dalam kebijakan publik sering disebabkan oleh implementasinya yang buruk (bad implementation), kebijakan yang kurang baik (bad policy), atau faktor keberuntungan yang kurang baik (bad luck). Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang saling terkait. Penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan bisa dilihat melalui model implementasi, di mana kompleksitas masalah diselesaikan dengan menggunakan model tertentu. Kebijakan pengelolaan air limbah

domestik merupakan kebijakan yang melibatkan model *top down* dan *bottom up* karena dimulai dari bawah dengan melihat adanya kebutuhan akan pengelolaan sanitasi aman di tengah masyarakat. Permasalahan terkait sanitasi diformulasikan oleh pemerintah untuk menjadi solusi terkait permasalahan sanitasi, yaitu melalui kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang telah diimplementasikan pada tahun 2016. Kebijakan tersebut melibatkan masyarakat mulai dari awal proses hingga pada pelaksanaannya karena bersifat swakelola.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan adalah kerangka atau indikator yang digunakan untuk menganalisis proses implementasi suatu kebijakan. Setiap pendekatan memiliki model kerangka kerja yang menghubungkan kebijakan dengan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Model implementasi kebijakan berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan situasi setelah kebijakan diterapkan, sehingga dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Terdapat beberapa pandangan dari para ahli mengenai model implementasi kebijakan, di antaranya:

1) Model Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn

   Van Meter dan Van Horn, seperti yang dijelaskan dalam Kasmad (2018), menguraikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari keputusan politik, dilanjutkan oleh pelaksanaan, dan akhirnya mencapai kinerja publik. Implementasi dianggap sebagai pencapaian performa kebijakan yang disengaja untuk mencapai tingkat kinerja kebijakan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai indikator. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018), proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn (1975) menghubungkan model konseptual antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Dalam menghubungkan kebijakan

dan kinerja kebijakan, terdapat sejumlah variabel bebas yang saling terkait, termasuk:

a) Standar, tujuan dan sasaran

   Keberhasilan kinerja kebijakan dapat diukur dengan memastikan bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan publik sesuai dengan budaya sosial di lingkungan di mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Standar atau ukuran dasar menjadi acuan yang berguna untuk menggambarkan tujuan kebijakan secara rinci dan komprehensif.

b) Sumber daya

   Pada tahap implementasi, diperlukan sumber daya yang berkualitas dan sesuai dengan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018), sumber daya yang penting meliputi sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Ketiga sumber daya ini saling berpengaruh dan perlu seimbang dalam keberadaannya.

c) Karakteristik pelaksanaan

   Karakteristik para pelaksana kebijakan, seperti norma, struktur birokrasi, dan pola hubungan yang terbentuk dalam birokrasi, akan memengaruhi proses implementasi. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus disesuaikan dengan konteks kebijakan yang ada. Selain itu, jangkauan wilayah kebijakan juga memengaruhi agen pelaksana kebijakan. Semakin luas jangkauan implementasi kebijakan, semakin banyak pelaksana yang terlibat di dalamnya.

d) Sikap atau kecenderungan para pelaksana

   Sikap agen pelaksana, baik itu berupa penerimaan atau penolakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan yang diterapkan tidak selalu merupakan hasil dari masukan langsung dari masyarakat yang

merasakan permasalahan yang dihadapi, sehingga mungkin terjadi penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut.

e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana

Kebijakan akan berhasil jika para pelaksana implementasi dapat memahami standar, tujuan, dan sasaran kebijakan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, dan sebaliknya.

f) Faktor lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik)

Aspek lain yang penting untuk menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan mendukung kesuksesan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan, pengaruh lingkungan seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik harus dipertimbangkan agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

2) Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III

Edward III (1980) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting dalam suatu kebijakan dan harus direncanakan serta dipersiapkan secara baik sehingga akan terimplementasi dengan baik. Menurutnya, tanpa keputusan implementasi yang efektif, pencapaian kesuksesan dalam kebijakan tidak akan tercapai. Edward III mengidentifikasi empat indikator yang saling terkait dan harus dikerjakan secara bersamaan, yaitu::

a) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan mampu dipahami oleh pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dibutuhkan suatu komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya

penyimpangan dalam implementasi dan terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

b) Sumber daya

Menurut Edward III, sumber daya memiliki implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Komponen-komponen sumber daya ini mencakup jumlah staf yang tersedia, kompetensi pelaksana kebijakan, ketersediaan informasi yang memadai dan relevan, adanya kewenangan yang memastikan kelancaran program, serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan.

c) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika pelaksanaan kebijakan menunjukkan sikap atau karakteristik yang positif, dan ada dukungan dari para pelaksana terhadap kebijakan, maka pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

d) Struktur birokrasi

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008), terdapat dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi, yaitu SOP (Standard Operating Procedure) atau prosedur kerja internal yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan dengan standar tindakan yang telah ditetapkan, dan fragmentasi yang mencakup bagian eksternal di luar unit birokrasi seperti komite legislatif, pejabat eksekutif, konstitusi negara, serta sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

3) Model Implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980)

Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

(Agustin, 2016). Menurut Grindle, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

a. Proses, berkaitan dengan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
b. Tujuan kebijakan, berkaitan dengan dampak dari kebiajakn tersebut kepada masyarakat dengan tingkat perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tergantung pada tingkat pelaksanaan kebijakan itu sendiri, dengan indikator pengukuran sebagai berikut.

a) Isi kebijakan *(Content of Policy)* yang terdiri dari:
   1. Pengaruh Kepentingan, yang menyoroti berbagai kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan seberapa besar pengaruh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakan.
   2. Manfaat yang Diperoleh, mengacu pada upaya kebijakan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaannya akan menghasilkan beberapa manfaat positif dalam kebijakan publik.
   3. Derajat Perubahan yang Diinginkan, mengacu pada seberapa besar perubahan yang diharapkan terjadi melalui pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan adanya skala yang jelas untuk mengukurnya.
   4. Kedudukan Pembuat Kebijakan, menekankan pentingnya peran pengambil keputusan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan di mana posisi pengambilan keputusan dari kebijakan yang diimplementasikan.
   5. Pelaksana Program, menyoroti pentingnya keberadaan pelaksana kebijakan yang kompeten dan terampil untuk mendukung keberhasilan program.
   6. Sumber Daya yang Digunakan, yang dapat mendukung implementasi kebijakan.

b) Lingkungan Implementasi *(Context of Implementation)* yang terdiri dari:

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Stakeholder. Perlu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika tidak diperhitungkan, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa. Lingkungan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan karakteristik lembaga yang berperan juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan.
3. Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana, merujuk pada sejauh mana pelaksana mematuhi kebijakan dan memberikan respons terhadap kebijakan publik.

4) Model Implementasi Kebijakan oleh Jones (1984)

Menurut Jones (1984), mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu program dengan tujuan menimbulkan atau memberikan efek atau dampak tertentu. Implementasi menjadi tindakan dalam melaksanakan suatu konsep dengan sasaran mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut Jones (1984) terdapat tiga pilar utama dalam implementasi kebijakan yang dianggap sangat penting, yaitu:

a) Pilar Organisasi

Pilar organisasi adalah upaya dalam membentuk atau mengatur kembali struktur suatu organisasi dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, organisasi merujuk pada unit-unit kerja, pembagian tugas yang di dalamnya yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, serta fasilitas dan infrastruktur yang ada.

1) Sumber daya

Sumber daya penting dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi personel yang memadai, baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas mereka, sumber daya finansial, serta fasilitas yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

2) Unit-unit atau kesatuan antar pelaksana

Struktur organisasi bertujuan untuk mengelola dan mendistribusikan tugas di antara anggota organisasi sehingga aktivitasnya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan struktur atau unit-unit harus diatur dengan peraturan yang jelas untuk mencegah terjadinya birokrasi yang dapat mengganggu wewenang, fungsi, bagian, atau posisi dalam organisasi (Jones, 1984).

3) Metode-metode

Dalam implementasi kebijakan, metode digunakan untuk memahami bagaimana dinamika dan fungsi organisasi berperan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan menggunakan metode yang sesuai, sebuah organisasi dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

b) Pilar Interpretasi

Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat diterima dan dimengerti oleh penerima kebijakan, diperlukan interpretasi sebagai usaha untuk mengkomunikasikan kebijakan dengan efektif kepada penerima kebijakan. Hal ini bertujuan agar tata cara dan peraturan dalam kebijakan dapat dipahami dengan baik. Pilar ini melibatkan proses komunikasi, pengenalan konsep, dan penjelasan tugas-tugas untuk memastikan pemahaman yang seragam di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penerimaan kebijakan. Oleh karena itu,

penting untuk membangun pemahaman bersama di antara para pelaksana. Dengan penafsiran yang tepat, kebijakan yang pada awalnya bersifat abstrak dapat dijabarkan menjadi kebijakan yang lebih teknis sehingga lebih mudah dipahami oleh para pelaksana dan penerima kebijakan.

c) Pilar aplikasi atau penerapan

Pelaksanaan kebijakan seringkali merupakan proses yang dinamis di mana para pelaksana mengikuti panduan program atau situasi aktual. Dalam pelaksanaan tersebut, diharapkan adanya tanggapan dari kelompok sasaran agar dapat dievaluasi apakah lingkungan mendukung atau menolak pelaksanaan serta dampak dari kebijakan tersebut. Karena itu, pelaksanaan kebijakan bukanlah tugas yang mudah, dan seringkali melibatkan tantangan yang harus diatasi oleh para pelaksana. Kegiatan pelaksanaan mencakup penyediaan layanan secara berkala, pengeluaran dana, atau tindakan lain sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia dalam kebijakan (Jones, 1984).

Setiap ahli memiliki faktor-faktor yang menonjol berdasarkan konteks lingkungan kebijakan yang diimplementasikan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih model implementasi yang dikemukakan oleh Jones (1984) karena model ini dipengaruhi oleh tiga pilar kunci, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Pemilihan model ini didasarkan pada kesesuaian indikator model implementasi kebijakan dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan swakelola pelaksanaan kebijakan mulai dari ketersediaan sumber daya, kondisi organisasi pelaksana, hingga penerapan. Sehingga dalam hal ini, teori Jones (1984) yang terdiri dari pilar organisasi, pilar interpretasi, dan pilar aplikasi dapat membantu menjelaskan permasalahan-permasalahan dari kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

2.4 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.4.1 Definisi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu bentuk program sanitasi berbasis masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). SPALD adalah sistem pelayanan sanitasi yang menyediakan pengelolaan air limbah untuk sekelompok rumah tangga melalui jaringan pipa, serta memiliki fasilitas pengolahan limbah di dalamnya. SPALD terdiri dari SPALD-S untuk wilayah dengan kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha dan SPALD-T dibangun di wilayah dengan kepadatan penduduk diatas 150 jiwa/ha. SPALD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pengolahan limbah dengan SPALD pada umumnya dibangun untuk daerah perkotaan. Namun melihat fakta masih banyaknya perilaku BABS dan perilaku masyarakat yang masih rendah terhadap pemeliharaan limbah, SPALD kini dibangun di daerah pedesaan yang memiliki indikator kumuh, kemiskinan ekstrem dan minimnya lahan untuk pembuangan limbah. (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023).

Pengelolaan air limbah domestik dilakukan untuk melindungi kualitas air lingkungan sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk infrastruktur sanitasi aman. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan saluran pipa dari setiap rumah ke instalasi pembuangan air limbah tunggal. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik menyediakan dua unit bak control yang menjadi pintu sambungan rumah, dua unit tersebut terbagi untuk limbah black water berupa kotoran manusia serta grey water yang merupakan hasil dari kegiatan mandi, cuci, kakus. Kebijakan ini tentunya didukung degan bantuan penyediaan jamban dari masyarakat sehingga pelaksanaan

pengelolan air limbah domestik menjadi optimal. Berikut skema infratsuktur dari SPALD.

Gambar 1. Skema Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui SPALD
Sumber: Nawasis, 2020.

SPALD terdiri dari sub siste pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat.

a) Subsistem pelayanan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengalirkan air limbah domestik dari setiap rumah ke dalam sistem pengumpulan melalui jaringan pipa. Subsistem pelayanan ini mencakup dua bak kontrol di setiap rumah.

Gambar 2. Sub Sisten Pelayanan SPALD
Sumber: Nawasis, 2020

b) Subsistem pengumpulan adalah fasilitas yang berperan dalam mengalirkan air limbah domestik melalui jaringan pipa dari subsistem pelayanan menuju subsistem pengolahan. Jaringan pipa ini ditempatkan pada beberapa titik yang dihitung berdasarkan kebutuhan.

Gambar 3. Sub Sistem Pengumpulan SPALD
Sumber: Nawasis, 2020

c) Subsistem pengolahan adalah infrastruktur dan fasilitas yang digunakan untuk memproses air limbah domestik yang telah dialirkan dari subsistem pengumpulan. Subsistem pengolahan ini juga dikenal sebagai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Proses pengolahan dilakukan melalui pengolahan fisik, biologis, dan kimiawi. Buangan dari sub sistem pengolahan merupakan air yang telah sesuai dengan baku mutu air yang dialirkan ke sungai maupun persawahan.

Gambar 4. Sub Sistem Pengolahan SPALD
Sumber: Nawasis, 2020

2.4.2 Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan sanitasi dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar untuk pengelolaan air limbah. Output dari kebijakan diantaranya:

a) Menekan pencemaran lingkungan
b) Meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan
c) Memperkuat upaya dalam menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup
d) Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan permukiman
e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan
f) Memperluas jangkauan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas air limbah
g) Memperkuat partisipasi masyarakat dan sektor bisnis

2.5 Kerangka Pikir

Kabupaten Pringsewu telah mencapai status Open Defecation Free (ODF) di Pulau Sumatera dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 2 tahun 2020. Kabupaten Pringsewu telah menerima penghargaan atas upayanya dalam pemenuhan sanitasi, penghargaan kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi *(demand creation)* dalam STBM *Awards* pada tahun 2020, yang merupakan apresiasi atas upaya percepatan sanitasi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, Kabupaten Pringsewu juga meraih penghargaan dalam Kategori ILBK (Infrastruktur *Livelihood* Berbasis Kawasan) Terbaik dalam KOTAKU *Awards* pada tahun 2023 yang di dalamnya termasuk pengelolaan air limbah. Meskipun hal tersebut mencerminkan pelaksanaan sanitasi yang baik, capaian sanitasi di daerah tersebut masih di bawah target, dengan hanya mencapai 4,8% serta menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA). Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di

Kabupaten Pringsewu seperti rendahnya kesadaran masyarakat terkait sanitasi aman dan kurangnya akses masyarakat akan sarana sanitasi aman.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi kebijakan dengan pendekatan Jones (1984) terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi

   Dalam pelaksanaan kebijakan, organisasi memainkan peran penting dalam menetapkan struktur unit-unit kerja, menugaskan tugas-tugas kepada masing-masing unit, termasuk alokasi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam organisasi.
2. Interpretasi

   Proses komunikasi, sosialisasi, dan penjelasan tugas-tugas yang jelas adalah kunci dalam memastikan pemahaman yang menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta penerima kebijakan, tentang pedoman pelaksanaannya.
3. Aplikasi

   Aplikasi merupakan sebuah proses yang dinamis di mana para pelaksana dipandu oleh pedoman program atau standar yang telah ditetapkan, serta terkadang diarahkan oleh kondisi aktual. Dalam proses ini, diharapkan akan timbul respons dari kelompok sasaran *(target group).*

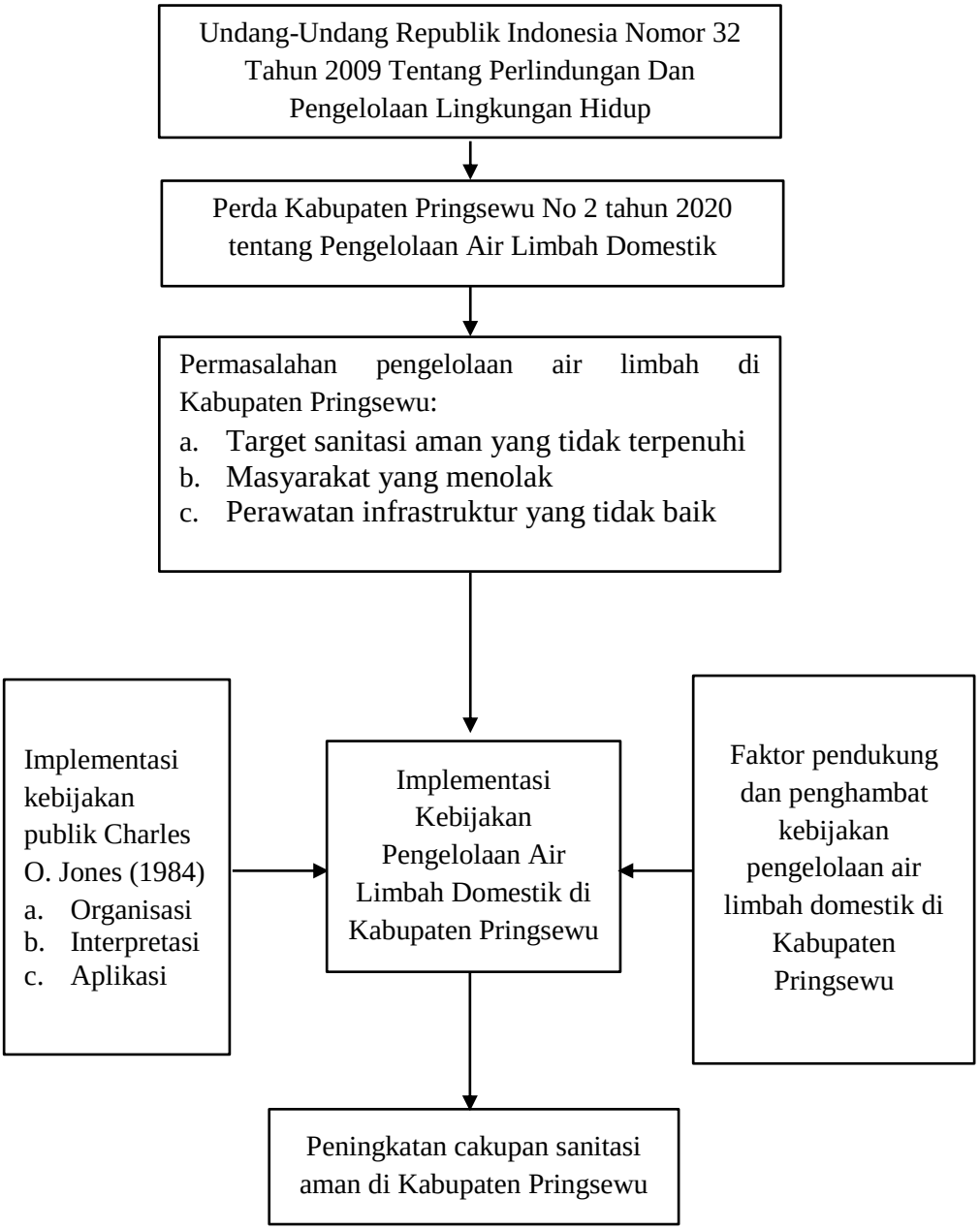

Gambar 5. Kerangka Pikir
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domesti. Metode tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam peningkatan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif akan diperoleh secara menyeluruh terkait dengan tahapan kebijakan publik dari awal hingga akhir. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses serta mengungkapkan makna dari setiap fenomena dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang tentunya didukung oleh teori yang dalam kerangka pikir.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membatasi pada proses pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan akan lebih terfokus dan spesifik. Penelitian ini terutama menekankan pada proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones (1984), yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai rangkaian aktivitas atau tindakan untuk menerapkan suatu program dengan tujuan

tertentu. Menurut Jones, implementasi kebijakan melibatkan tiga aktivitas utama yang sangat krusial, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

3.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu

Implementasi kebijakan berdasarkan pandangan Jones (1984)

1. Organisasi, pilar ini terdiri dari sumber daya, unit-unit, serta metode. Dalam penelitian ini mencakup tentang:
   a) Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana pendukung. Sumber daya manusia mencakup kemampuan dan ketersediaan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP), serta masyarakat setempat. Sumber daya finansial meliputi anggaran yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 baik dalam tahap konstruksi maupun operasional. Kemudian ketersediaan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

   b) Unit-Unit atau struktur, yaitu terkait penataan tatalaksana organisasi, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, serta pola hubungan yang menunjukkan kedudukan, tugas, serta tanggung jawab masing-masing unit organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik seperti Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, KSM, dan KPP.

   c) Metode, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang disesuaikan dengan visi dan misi kebijakan pengelolaan air limbah domestik yaitu terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi yang berbasiskan kepada masyarakat serta bagaimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan

menggunakan sumber daya secara efektif sesuai dengan visi dan misi tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat serta mengubah secara sistematis dan konsisten pola pikir dan budaya masyarakat Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik.

2. Interpretasi

   Dalam konteks interpretasi, yang akan dilihat adalah pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu berkaitan dengan sejauh mana terdapat pemahaman yang konsisten antara pelaksana dan penerima terhadap peran masing-masing. Pentingnya proses penyampaian informasi, sosialisasi, dan kejelasan tugas menjadi kunci, yang dilakukan melalui komunikasi yang efektif. Selain itu, konsistensi pelaksana juga menjadi faktor penting untuk memastikan kesesuaian antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan dalam kebijakan tersebut.

3. Aplikasi atau Penerapan

   Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, aplikasi kebijakan menjadi proses dinamis di mana para pelaksana diarahkan oleh pedoman kebijakan. Melalui aplikasi ini, dapat dievaluasi apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi serta hasil dari kebijakan tersebut. Khususnya terkait dengan kegiatan perawatan rutin SPALD, pembayaran iuran, dan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pertemuan rutin dari kelompok sasaran penerima SPALD. Semua ini dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik tahun 2020.

3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Penelitian ini membahas terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu karena Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu kabupaten yang telah berstatus ODF *(Open Defecation Free)* di Pulau Sumatera sehingga harus melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, Kabupaten Pringsewu telah memperoleh penghargaan terkait dengan pencapaian sanitasi dalam STBM *Award* pada tahun 2020. Namun, masih terdapat pertumbuhan sanitasi aman yang cukup lambat apabila dilihat dari gap yang ada dari pertumbuhan sanitasi setiap tahunya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. Pemilihan lokasi pekon ditentukan berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pekon dengan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang cukup baik dan kurang baik, dengan titik lokasi pekon yaitu Pekon Sidoharjo, Pekon Ambarawa Barat, Pekon Rejosari, dan Pekon Waluyojati.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data primer

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini dari subjek baik secara individu maupun kelompok. Penentuan data primer

sering kali dilakukan melalui metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada dokumen-dokumen tertulis seperti surat keputusan, catatan-catatan, arsip, buku-buku literatur, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi. Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu serta arsip lainnya yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi secara langsung terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3.5.1 Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam situasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik untuk meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. Data yang diperoleh dari observasi ini mencakup informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan,

kondisi, proses, dan pemeliharaan instalasi terkait. Observasi ini melibatkan pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan jumlah responden yang tidak terlalu besar, sehingga merupakan proses pengamatan yang kompleks.

Tabel 4. Daftar Observasi Lokasi Penelitian

No.	Kegiatan Observasi	Hasil
1.	Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 di Pekon Waluyojati dan Pekon Sidoharjo. Peneliti melakukan pengamatan terkait dengan lokasi fisik dari SPALD. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui bahwa SPALD di Pekon Waluyojati masih tampak bersih dan baik. Kemudian SPALD di Pekon Sidoharjo keadaannya cukup kotor dan dijadikan sebagai gudang oleh warga sekitar.	
2.	Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 di Pekon Waluyojati dan Pekon Sidoharjo. Peneliti melakukan pengamatan di Bak Kontrol beberapa rumah warga.	
3.	Pengamatan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 di Pekon Rejosari dan Pekon Ambarawa. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui bahwa SPALD di Pekon Rejosari masih tampak baik namun terdapat luapan air dan berbau. Kemudian SPALD di Pekon ambarawa barat masih cukup bersih dan baik meskipun berbau. Kedua SPALD juga telah memiliki saluran keluaran yang dialirkan ke sawah.	

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.5.2 Wawancara

Dalam upaya memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan akan diajukan kepada informan secara langsung. Proses wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan kebijakan

pengelolaan air limbah domestik. Sebagai hasilnya, empat pekon di Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai sampel untuk penelitian ini, berikut daftar informan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Fungsi Informan
1.	Andhika Perangin Angin, S.Kom., M.M	Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu	24 Januari 2024	Pemahaman terkait kebijakan pengelolaan air limbah domestik.
2.	Hari Wahyudi, S.Ars.	Kasi Bidang Cipta Karya	24 Januari 2024	Pemahaman terkait regulasi dan pelaksa-naan pengelolaan air limbah domestik.
3.	Ferly Prambudio	Sekretaris Desa Pekon Rejosari	29 Januari 2024	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di Pekon Rejosari.
4.	Budoyo	Kasi Perencanaan Pekon Ambarawa Barat	29 Januari 2024	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di Pekon Ambarawa Barat.
5.	Budi Laksana	Kepala Dusun Pekon Waluyojati	25 Januari 2024	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di Pekon Waluyojati
6.	Manfangati	Kelompok Swadaya Masyarakat Pekon Sidoharjo	25 Januari 2024	Pembangunan dan Pe-meliharaan SPALD di Pekon Sidoharjo
7.	Margono	Lembaga Swadaya Masyarakat Pekon Waluyojati	22 Februari 2024	Pembangunan dan Pe-meliharaan SPALD di Pekon Sidoharjo
8.	Winarto	Anggota KPP Pekon Sidoharjo	25 Januari 2024	Kegiatan operasional, pemeliharaan, serta iuran dalam pengelolaan air limbah domestik di Pekon Sidoharjo.
9.	Jatmoko	Anggota KPP	29 Januari	Kegiatan operasional,

		Pekon Rejosari	2024	pemeliharaan, serta iuran dalam pengelolaan air limbah domestik di Pekon Rejosari.
10.	Suyatno	Anggota KPP Pekon Ambarawa Barat	29 Januari 2024	Kegiatan operasional, pemeliharaan, serta iuran dalam pengelolaan air limbah domestik di Pekon Ambarawa Barat.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang mencakup berbagai catatan terkait dengan isu penelitian yang penting, baik dari organisasi maupun individu terkait. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa data dokumentasi seperti:

Tabel 6. Dokumen Penelitian

No.	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1.	Perda Kabupaten Pringsewu No 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tentang penyelenggaraan SPALD sebagai sarana dan prasarana dalam pelayanan air limbah domestik terpusat.
2.	DAK Reguler Sanitasi TA. 2022	Data dan Anggaran pelaksanaan SPALD-T di Kabupaten Pringsewu
3.	Masterplan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	Data Infrastruktur Sanitasi SPALD
4.	Pedoman Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Sanitasi	Pelaksanaan SPALD mulai dari perencanaan hingga struktur organisasi
5.	RKM dan Surat Hibah Setiap Desa	Rencana Pembangunan SPALD

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Berdasarkan pernyataan Miles dan Huberman (2014), analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan memfokuskan data mentah menjadi lebih jelas dan sesuai dengan permasalahan dengan cara merangkum, meringkas, dan memilah hal pokok terkait dengan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan menguraikan dan merangkum data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan. Reduksi data memudahkan untuk mendapat poin penting dalam analisis data bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

3.6.2 Penyajian Data

Data yang telah dianalisis kemudian disajikan agar mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran secara menyeluruh dan memahami bagian-bagian penting dalam penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk naratif, diagram, tabel, atau gambar, yang membantu peneliti dalam mengekstraksi tindakan dari kesimpulan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, foto-foto terkait, serta tabel atau diagram yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif, di mana peneliti menganalisis dan mencari pola serta

hubungan persamaan dari hasil penelitian. Proses ini dilakukan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, penyimpulan hasil dilakukan dengan merangkum intisari dari beberapa kategori hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.

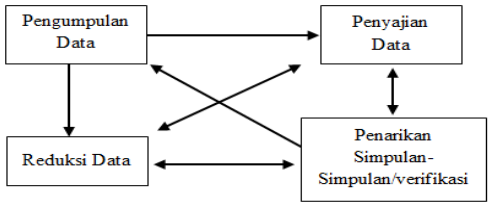

Gambar 6. Teknik Analisis Data
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.7 Teknik Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh sebelumnya harus memenuhi syarat keabsahan data sehingga dapat dikatakan *valid* (Sari, 2023). Menurut Sugiyono (dalam Sari, 2023) terdapat beberapa indikator dalam uji keabsahan data:

3.7.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Untuk memperoleh hasil penelitian yang memiliki validitas tinggi sesuai dengan realita di lapangan perlu dilakukan uji kredibilitas. Berdasarkan konsep kredibilitas semua informasi data dalam penelitian harus dibangkitkan kembali dari subjek atau partisipan yang diteliti. Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara:

1. Memperpanjang Pengumpulan Data

   Meningkatkan durasi keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan melibatkan melakukan pengamatan tambahan dengan kembali ke lapangan lagi.

2. Triangulasi

   Triangulasi adalah proses memverifikasi data dari multiple sources dengan berbagai metode dan periode waktu untuk memastikan keabsahan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informasi yang diberikan oleh informan.

3.7.2 Uji Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian transferabilitas bertujuan untuk menilai seberapa jauh hasil penelitian dapat dimengerti dan diterapkan oleh pihak lain. Proses uji ini melibatkan pengumpulan data terkait implementasi pengelolaan air limbah domestik dari penelitian sebelumnya untuk dibandingkan, dianalisis, dan diperdalam pengetahuan dalam konteks penanganan masalah sanitasi.

3.7.3 Uji Ketergantungan (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan penelitian, mulai dari penentuan masalah atau fokus penelitian, alokasi sumber daya, hingga proses analisis dan pembuatan kesimpulan, yang dievaluasi oleh seorang auditor independen atau pembimbing. Ketika peneliti tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang langkah-langkah lapangan yang telah dilakukan, maka kredibilitas dependabilitas penelitian tersebut tidak dapat dipastikan.

3.7.4 Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji confirmability adalah evaluasi terhadap objektivitas suatu penelitian, di mana hasil-hasil yang dihasilkan selama proses penelitian dievaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan apakah telah memenuhi standar confirmability atau tidak.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu belum mencapai tingkat optimal. Ini diperkuat oleh fakta bahwa persentase sanitasi yang aman di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 hanya sebesar 4,8%, yang jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2023, tidak ada peningkatan yang signifikan, dan angka tersebut tetap stagnan pada 4,8%. Berdasarkan teori Jones (1984), masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan secara optimal. Pada aspek organisasi adanya sumber daya yang belum termanfaakan secara maksimal, dimana kinerja KPP masih belum cukup baik dan hanya berkisar 50% di Kabupaten Pringsewu. Tidak optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan disebabkan oleh sumber daya anggaran yang masih rendah, dimana hal tersebut menyebabkan belum tersedianya infrastruktur SPALD di seluruh Kabupaten Pringsewu akibat rendahnya pendanaan. Kendala lainnya dimana sumber daya manusia tidak dapat memanfaatkan sumber daya akibat tidak tersedianya sumber daya dalam kegiatan implementasi. Pada aspek interpretasi, rendahnya pemahaman dari KPP terkait dengan teknis pelaksanaan dan tujuan serta perannya menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan kegiatan operasional SPALD. Selain itu rendahnya interpretasi masyarakat terkait dengan sanitasi aman dan hubungannya dengan kesehatan menyebabkan rendahnya dukungan

terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di setiap pekon.

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, diantaranya:
   1) Struktur Birokrasi

      Terdapat struktur birokrasi yang terdiri dari berbagai organisasi atau unit sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terdapat SOP yang jelas dan terstruktur.

   Sementara itu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, terdiri dari:

   1) Sumber Daya

      Kurang optimalnya aspek-aspek dalam sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

   2) Kesadaran Masyarakat

      Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal perilaku seperti membuang limbah padat ke saluran perpipaan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan iuran dapat meghambat jalannya perrawatan kebijakan..

   3) Interpretasi

      Kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun pelaksana kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pelaksana kebijakan maupun bagi penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu hendaknya dapat bekerjasama dengan KSM dan KPP untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan sekali untuk menciptakan komunikasi secara langsung yang baik dan meningkatkan kesadaran dan kewajiban pekon dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik.
2. Meningkatkan komunikasi baik secara horizontal antar anggota KPP melalui pertemuan rutin atau melalui *group Whatsapp* untuk meningkatkan koordinasi kelompok, maupun secara vertikal kepada masyarakat melalui media sosial atau pamflet dan banner terkait dengan sanitasi aman dan pengelolaan air limbah domestik.
3. Bekerjasama dengan instansi lain baik perguruan tinggi maupun instansi di bidang kesehatan seperti sanitarian puskesmas serta Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi, sosialisasi, maupun penyuluhan terkait pentingnya menjaga sanitasi dan hubungannya dengan kesehatan.
4. Perlu adanya keterlibatan pemerintah pekon dalam hal pembiayaan maupun peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai pendekatan yang interaktif dan komunikatif serta dapat mempersuasif masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. CV Alfabeta: Bandung.

Abdullah, F. N. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV Harfa Creative: Bandung.

Abdillah, M. (2021). Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) IPAL Komunal di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9434

Abidin, dkk. (2022). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022. *Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*.

Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Allu, A. dkk. (2023). Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman Di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Administrasi Negara, 29(2): 147 – 170. http://dx.doi.org/10.33509/jan.v29i2.2385

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Penerbit Pustaka Setia: Bandung.

Ardiansyah, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Jurnal Responsive, 4(1): 13 – 22. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/34108/15807

Ariga, S. (2022). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Sehat, Berkualitas di Lingkungan Rumah. Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3): 720 – 730. https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety

Askar. (2019). Dimensi Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pembangunan (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Sosio Sains, 5(1): 53 – 61. https://media.neliti.com/media/publications/492115-none-37bd8efb.pdf

Aviandani, K. dkk. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Jurnal Respon* Publik, 16(6): 43 – 53. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/16624

Basri, M., dkk. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Administrasi Publik, 2(1): 15 – 24. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26

BPS Kabupaten Pringsewu. (2020). *Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu*. Diakses November 2023, melalui https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/40/211/2/proyeksi-penduduk-kabupaten-pringsewu.html

BPS Kabupaten Pringsewu. (2021). Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pringsewu 2021-2022. Diakses Oktober 2023, melalui https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/158/320/1/indeks-kualitas-air-ika-dan-indeks-kualitas-udara-iku-kabupaten-pringsewu.html

BPS Kabupaten Pringsewu. (2023). Pringsewu dalam Angka 2023. Diakses Januari 2024, melalui https://pringsewukab.bps.go.id/publication/2023/02/28/203dae1b2cc68846e641c937/kabupaten-pringsewu-dalam-angka-2023.html

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Penerbit CAPS: Yogyakarta.

Dakhi, S. & Sujianto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Tualang (Studi Kasus Perda Kab.Siak No.1 Tahun 2017). *Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau*. 6(1): 336 – 349. https://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1851

Dewi, D. D. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi. PT Samudra Biru: Yogyakarta.

Dimara, C. F. Y., dkk. (2020). Perencanaan Sistem Jaringan Pengolahan Air Limbah Domestik Di Kelurahan Banjer Lingk.V Kecamatan Tikala. *Jurnal Sipil Statik.* 8(3): 431 – 442. https://ejournal.unstrat.ac.id/

Dinyati, Fahimmatur Rizka. (2022). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang*. https://repo.itskesicme.ac.id/6386/

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Ekwanto, P. J. dkk. (2023). Efisiensi Pengolahan Air Limbah Domestik pada IPAL Komunal di Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Teknik, 1(21): 77 – 91. https://doi.org/10.37031/jt.v21

Ertanto, D. (2021). Batas Administratif Kabupaten Pringsewu. Diakses pada Januari 2024, melalui https://id.scribd.com/document/517943346/BATAS-ADM-KABUPATEN-PRINGSEWU

Fadhli, M. N. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Di Mis Azzaky Medan. Ability: Journal of Education and Social Analysis, 2(2): 8 – 21. https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa/article/view/139

Green Network. (2023). Langkah Kemmenterian PUPR Sediakan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak. Diakses Oktober 2023, melalui https://greennetwork.id/unggulan/langkah-kementerian-pupr-sediakan-akses-air-bersih-dan-sanitasi-layak/#:~:text=Rencana%20Pembangunan%20Jangka%20Menengah%20Nasional%20(RPJMN)%202020%2D2024,(BABS)%20hingga%200%%20pada%20akhir%20tahun%202024

Haryoko, dkk. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Universitas Makassar: Makassar. https://opac.perpusnas.go.id/

Hasbi, I. dkk. (2021). Kebijakan Publik. Penerbit Widina Bhakti Persada: Bandung.

Haniza, T. Z. dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik Di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro, hlm. 1 – 20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/34572/27268

Illahi, K. N., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Program Instalasi Pengolahan Air Limbah Berbasis Masyarakat Di Rt 06 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Jurnal Publika, 10(4): 1215 – 1226. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48054/40224

Imerlin, I. R., dkk. (2021). Evaluasi Implementasi Program Sanimas Di Dusun Kragilan Kota Surakarta. *Planning for Urban Region and Environment*. 10(4): 1 – 12. https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/27

Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.

Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. CV Kedai Aksara: Makassar.

Kusnaidi, dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6(2): 2593 – 2603. http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3188

Kemenkes. (2019). *Derajat Kesehatan 40% Dipengaruhi Lingkungan*. Diakses Agustus 2023, dari https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/derajat-kesehatan-40-dipengaruhi-lingkungan

Kusumastuti, dkk. (2021). Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Penataan Kampung yang Berkelanjutan (Studi Kasus:

Kampung Ngemplak, Jebres, Kota Surakarta). Jurnal Desa-Kota, 3(2): 171 – 178. https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/download/45466/32715

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. CV Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.

Miles, M. B., & Huberman, A M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. USA: Safe Publications. UI-Press.

Mustofa, N. F. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi Di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau. https://repositori.uir.ac.id/

Muamar, A. (2022). Langkah Kementerian PUPR Sediakan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak. Diakses pada Agustus 2023, melalui https://greennetwork.id/unggulan/langkah-kementerian-pupr-sediakan-akses-air-bersih-dan-sanitasi-layak/

Mulyani, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau,* 8(2): 1-9. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30913

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. PT Leuntika Nouvalitera: Yogyakarta.

Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk). Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, 1(6): 58 – 75. https://journal.uii.ac.id/selma/index

Octavia, I. (2020). Pengelolaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), 7(2). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/28886

Olo, A., dkk. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 5(2): 1113 – 1126. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.788

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri No 04/PRT/M/2017 terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Indonesia.

Ponto, A. M., dkk. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 3(20): 36 – 53. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/12440

Prabawati, I., dkk. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Penerbit Uniesa Umiversity Press: Surabaya.

Rafyansyah, dkk. (2022). Kebijakan Publik. Penerbit Global Eksekutif Teknologi: Sumatera Barat.

Raharjo, dkk. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pringsewu. Prosiding Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP). https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.222

Rasyidah, U. M. (20219). Diare Sebagai Konsekuensi Buruknya Sanitasi Lingkungan. KLUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran. 1(1): 31 – 36. https://doi.org/10.24123/kesdok.v1i1.2485

Ronika, Z. C., dkk. (2022). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. https://www.researchgate.net/publication/

Rosadi, D. dkk. (2023). Program Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 3(2): 84 – 90. https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i2.1473

Rustiani, A. R., dkk (2022). Kajian Strategi Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bumi Ayu Kabupaten Pringsewu. Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP). https://snip.eng.unila.ac.id/ojs/index.php/snip/article/view/289

Saputra, R., dkk. (2021). Implementasi Pada Program Kotaku (Studi Pada Pembangunan Sanitasi Khususnya Spald-T Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2019). SOJ Umrah. Sa'ban, L. A., dkk. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 5(1): 10 – 16. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4365

Sari, D. R. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sehat Negeriku. (2019). Derajat Kesehatan 40% Dipengaruhi Lingkungan. Diakses Oktober 2023, melalui https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190221/3029520/derajat-kesehatan-40-dipengaruhi-lingkungan/#:~:text=Blum%20yang%20menyebutkan%20bahwa%20derajat,%25%20faktor%20genetika%20(keturunan)

Smart Village Kabupaten Pringsewu. (2024). Data Statistik Kabupaten Pringsewu. Diakses Januari 2024, melalui https://pringsewu.smartvillage.co.id/

Sugandha, Dann. (2011). Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Penerbit Intermedia: Jakarta

Suruan, A. L., Dkk. (2019). Upaya Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik, 5(74). https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/23833/0

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit AIPI: Bandung.

Taufiqurrakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama: Jakarta Pusat

Tetuko, M. P. P., & Subekti, R. (2022). Implementasi Program Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Domestik Di Kelurahan Danukusuman Kota Surakarta. Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. 5(3): 330 – 342. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.554322(2): 1382 – 1389. https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1220

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentag Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yusuf, N. F., dkk. (2017). Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung). Jurnal Administrasi Negara, 2(1): 43 – 50. http://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/13682/6521